



Pengaruh Kepentingan Nasional dan Interdependensi Ekonomi Terhadap Kebijakan *Expeditious Disengagement* Tiongkok-India pada Krisis Doklam 2017

Wahyu Sri Rejeki

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The Doklam crisis occurred in 2017 and caused increased tensions between China and India, which had relatively more stable relations after the 1962 war. The crisis was caused by direct violations committed by China by building roads in the border region with Bhutan. The border of Doklam which triggers tension is a border area between China and Bhutan, while Bhutan is a country that legally receives military protection from India according to the 1949 Friendship treaty agreement. Tensions between the two countries decreased with an agreement for 'expeditious disengagement' to restore the 'status quo', the agreement took place quickly even though the two countries were previously at odds with each other. This study aims to analyze the factors that led to the achievement of policies to reduce tensions between China and India. This study uses a qualitative method using the concepts of national interest and economic interdependence. The results of this study indicate that expeditious disengagement policy to reduce tensions between China and India is influenced by the concept of national interests and economic interdependence.

Keywords: *Doklam Crisis, Expeditious Disengagement, , Economic Interdependence*

PENDAHULUAN

Syarat berdirinya suatu negara meliputi dua unsur yaitu unsur konstitutif dan unsur deklaratif atau pengakuan. Wilayah dalam unsur konstitutif meliputi laut, darat dan udara yang memiliki peran besar dalam pembentukan Negara. Mengingat pentingnya wilayah sebagai tempat berdirinya pemerintahan yang berdaulat, maka sering terjadi konflik antar negara yang disebabkan oleh perebutan wilayah atau *territorial dispute*.

Salah satu persengketaan wilayah yang terjadi adalah persengketaan batas wilayah antara Republik Rakyat Tiongkok dengan India dan Bhutan yang mulai memanas pada Juni 2017 di Doklam, Himalaya. Dataran tersebut merupakan wilayah perbatasan antara Bhutan dengan Tiongkok, disana Tiongkok membangun jalan hingga ke kamp militer Bhutan. India terdampak oleh hal tersebut dikawasan Siliguri Corridor yang menghubungkan wilayah terpencil India di timurlaut. Menurut *Friendship Treaty 1949* India dapat memberikan jaminan perlindungan keamanan bagi Bhutan, apabila mendapat ancaman eksternal dari Negara lain.

Ketegangan terjadi selama 73 hari dimana kedua Negara saling memberikan pernyataan yang agresif di media massa, pernyataan tersebut dikeluarkan langsung oleh petinggi militer kedua Negara. India menyatakan kesiapannya untuk berperang, sedangkan Tiongkok menyatakan agar India siap mendapatkan kerugian besar apabila perang terjadi.

Namun, tensi hubungan kedua Negara mulai menurun dan kemudian menerapkan kebijakan *expeditious disengagement*, sebagai bukti meredanya konflik perbatasan.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk-bentuk ketegangan diantara Tiongkok dengan India, dan kemudian untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi Tiongkok dengan India untuk mengurangi ketegangan dengan menerapkan kebijakan *expeditious disengagement* pada Krisis Doklam tahun 2017.

Kemudian penelitian ini akan menjelaskan faktor yang mendorong Tiongkok dan India menerapkan kebijakan *expeditious disengagement* pada krisis Doklam 2017. Pada penelitian ini penulis akan menggunakan konsep kepentingan nasional dan interdependensi ekonomi. Kepentingan nasional menentukan perilaku suatu Negara dan menjadi pembenaran dari setiap kebijakan suatu Negara yang didasarkan pada beberapa aspek yaitu kepentingan pertahanan, ekonomi, dan *world order* (Nuechterlein, Donald. 1976). Sedangkan konsep interdependensi ekonomi berasumsi bahwa Negara yang berada dalam ketergantungan ekonomi, akan memilih untuk tidak berperang, dan lebih memaksimalkan pencapaian kemakmuran melalui perdagangan (Rosecrance. 1986). Penelitian ini kemudian akan menjelaskan lebih lanjut tentang faktor kepentingan nasional dan interdependensi ekonomi untuk pada kebijakan *expeditious disengagement* Tiongkok-India.

PEMBAHASAN

Dinamika Hubungan Diplomatik antara Tiongkok dengan India

Hubungan diplomatik antara Tiongkok dengan India dimulai sejak tahun 1949 dibawah kepemimpinan Presiden Jawaharlal Nehru, India adalah Negara non-sosialis pertama yang membangun hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Hubungan kedua Negara juga dipengaruhi oleh kedekatan India dengan Bhutan. Okupasi Tibet pada tahun 1950 mempengaruhi hubungan kedua Negara, dimana dengan masuknya Tibet ke Tiongkok maka batas Negara pada *Line of Actual Control* semakin sulit untuk dicapai kesepakatan.

Di bagian Barat, Tiongkok dan India memperebutkan wilayah Aksai Chin dimana Tiongkok sudah membuat jalan dari Xinjiang ke Tibet dan membangun pos, serta diwilayah garis McMohan hingga bagian Selatan juga diperebutkan dan didaftarkan sebagai wilayah India melalui *North East Frontier Agency* pada 1951 (NEFA).

Pada tahun 1954 Tiongkok-India sepakat untuk menandatangani *Panchsheel Agreement* yang didalamnya terdapat lima prinsip dasar hidup berdampingan secara damai, hal tersebut semakin membawa kedua Negara dalam kondisi hubungan yang baik, sehingga muncul slogan dalam hubungan bilateral keduanya yaitu *Hindi-Chini Bhai Bhai* yang disampaikan oleh PM Nehru dan pemimpin Cina Mao Zedong yang memiliki makna *India and China are brothers*.

Kondisi hubungan baik Tiongkok-India tidak berlangsung lama, ketegangan mulai terjadi kembali akibat pemberontakan Tibet pada 1959. Dalai Lama yang merupakan aktivis pergerakan Tibet mulai memutar keadaan dengan masuk dan mencari suaka politik di India dengan mengirimkan surat langsung kepada presiden Nehru, hal ini mendasari tuduhan Tiongkok atas India sebagai otak dalam pemberontakan yang terjadi. Hubungan tidak semakin membaik, Presiden Nehru menyatakan tindakan pengeklaiman oleh Tiongkok sebagai agresi kartografi dan tindakan atas Tibet sebagai bentuk Imperialisme. Tiongkok ingin menerapkan kebijakan *sanhe yishao* pada tahun 1962 untuk merekonsiliasi hubungan dengan India namun tidak mendapat respon baik dari India. Hal tersebut ditanggapi oleh sikap presiden Nehru yang mulai tegas, menerapkan *forward policy* yang berisi tentang ambisi untuk mempertahankan teritorial tanpa terpengaruh oleh pihak lain.

Perang terjadi pada tahun 1962, dimana Tiongkok melakukan penyerangan untuk merusak fasilitas militer yang digunakan untuk menunjang *forward policy* dan kemudian

konflik terjadi hingga terdapat kebijakan untuk gencatan senjata yang dimenangkan oleh Tiongkok. Hubungan kedua Negara tidak terjadi selama 15 tahun, Tiongkok-India mulai melakukan pertemuan bilateral pada tahun 1976 dan kemudian mulai menyusun perjanjian untuk menyelesaikan masalah perbatasan.

Perjanjian Perbatasan antara Tiongkok-India

Tiongkok dan India mulai melakukan perjanjian perbatasan pada tahun 1993, *Agreement on the Maintenance of Peace and Tranquillity along the Line of Actual Control in the India- China Border Areas (BPTA)*, 07 September 1993. Perjanjian ini dibuat setelah terjadi dua peristiwa unjuk kekuatan di perbatasan yaitu penembakan di Nathu La dan Cho La, Sikkim pada tahun 1967 dan krisis di Sumdorong Chu, Arunachal Pradesh. Perjanjian Mengatur tentang permasalahan perbatasan India-Tiongkok yang harus diselesaikan melalui konsultasi yang damai dan bersahabat, menurunkan jumlah pasukan dan pembentukan *Joint Working Group (JWG)* sebagai pihak yang bernegosiasi tentang masalah perbatasan. Perjanjian 1993 tersebut kemudian diperbaharui dengan perjanjian baru yang berisi pasal baru tentang tata cara dalam melakukan hubungan baik kedua Negara melalui JWG pada proses negosiasi. *Agreement on Confidence Building Measures in the Military Field along the Line of Actual Control in the China- India Border areas (CBM's)* 1996 membahas tentang pembentukan Special Representative (SR). Kemudian pada tahun 2015 dibentuk perjanjian baru, yang dinamakan *Agreement on the Political Parameter and Guiding Principles for Settlement of the India – China Boundary question* merupakan penekanan terhadap perjanjian terdahulu yang sudah dilakukan pada tahun 1993 dan 1996. Berisi tentang parameter politik berikut dengan prinsip-prinsip pedoman untuk penyelesaian batas wilayah, dan komitmen penyelesaian secara damai.

Pada tahun 2012 kembali dilakukan perjanjian yaitu *India- China Agreement on the Establishment of a working mechanism for consultation and coordination on India- China Border Affairs*, didalamnya berisi tentang mekanisme kerja untuk mengatasi masalah lain yang timbul diperbatasan yang tidak masuk dalam agenda JWG dan SR.

Perjanjian terakhir tentang perbatasan sebelum krisis Doklam terjadi yaitu pada tahun 2015, *Agreement Between the Government of the Republic of India and the Government of the People's Republic of China on Border Defence Cooperation (BDCA)*, perjanjian tersebut menjelaskan tentang kerjasama perbatasan, Komitmen dari BDCA adalah sebagai pola baru untuk meningkatkan hubungan militer dan menyelesaikan insiden. Perjanjian ini dibuat karena adanya serangan oleh *People Liberation Army (PLA)* yang rata-rata terjadi 250-300 kali dalam satu tahun. Pemerintah India menyatakan terdapat 500 pelanggaran Tiongkok dalam dua tahun yaitu diantara tahun 2011-2012, 90% terjadi di Ladakh. Namun terdapat keyakinan bahwa itu bukan penyerangan tetapi kasus pelanggaran perbatasan karena perbedaan interpretasi tentang batas wilayah.

Beberapa perjanjian perbatasan yang telah dilakukan tidak mendorong pada penyelesaian sengketa wilayah, Perjanjian perbatasan antara Tiongkok dan India dalam prakteknya tidak dapat menghindarkan Negara tersebut pada krisis perbatasan. Krisis Doklam tidak dapat dihindarkan karena Tiongkok sebagai salah satu pihak dalam perjanjian perbatasan melakukan pelanggaran langsung atas ketentuan perjanjian. Krisis yang sering terjadi akibat pelanggaran perbatasan oleh masing-masing pihak umumnya diselesaikan melalui negosiasi politik, dan pada krisis Doklam 2017 ini terjadi kesepakatan kedua belah pihak untuk menerapkan kebijakan *expeditious disengagement*.

Faktor kepentingan Nasional dalam pengambilan kebijakan expeditious disengagement

Aspek kepentingan pertahanan atau keamanan nasional menjadi salah satu pendorong oleh Tiongkok dan India untuk menurunkan tensi ketegangan. Apabila dilihat pada strategi pertahanan, kedua Negara menerapkan sistem pertahanan defensif. Kepentingan pertahanan

Tiongkok berfokus untuk tetap memelihara kondisi yang kondusif dalam memelihara pembangunan nasional, dan tetap didukung dengan kekuatan militer yang mumpuni. Sedangkan India, secara general menerapkan sistem pertahanan yang fleksibel sesuai kondisi geopolitik global. Sistem pertahanan yang defensif serta keinginan untuk semakin berkembang sebagai *new emerging power* adalah salah satu pendorong kebijakan untuk menurunkan tensi ketegangan.

Aspek kepentingan pertumbuhan ekonomi, Tiongkok-India telah melakukan perjanjian di beberapa aspek perekonomian berupa perjanjian perdagangan. Perdagangan membantu kedua Negara untuk tetap dalam kondisi yang baik guna menciptakan stabilitas pertumbuhan nasional. Kedua Negara telah melakukan perdagangan bebas, dan memiliki kerjasama di bidang perekonomian. Salah satu faktor mengapa krisis doklam diakhiri dengan kebijakan *expeditious disengagement* adalah adanya pertemuan BRICS, dimana kerjasama multilateralisme tersebut menjadi jembatan negosiasi kedua belah pihak ketika krisis terjadi.

Aspek kepentingan *world order* atau *balance of power*, Efek sekutu/kawan memainkan peran penting dalam hal pertimbangan kekuatan sehingga konflik tetap dalam kondisi seimbang. Keseimbangan diperlukan agar masing-masing pihak dapat lebih menahan diri karena dominasi kekuatan dan hegemoni dapat dihindari. Dapat dikatakan bahwa *Balance of Power* adalah cara untuk menghindari konflik, merupakan cara relatif untuk menyeimbangkan kekuatan Negara yang berkonflik, sehingga Negara dengan kekuatan yang lebih besar tidak akan memulai untuk berperang.

Pada krisis Doklam terdapat beberapa pernyataan dari Negara yang memiliki hubungan baik dengan Tiongkok maupun India terkait penyelesaian krisis. Amerika Serikat menyatakan untuk menyelesaikan konflik perbatasan secara damai, sedangkan Jepang menyarankan untuk dilakukan dialog terbuka bersama, serta menyatakan bahwa tindakan Tiongkok adalah hal yang provokatif dan seharusnya mendapat kecaman komunitas internasional. Pada sisi Tiongkok, beberapa Negara memilih untuk bersikap netral atas sikap agresif Tiongkok pada isu perbatasan.

Aspek prestise nasional yang membentuk sikap wibawa Negara dalam penyelesaian konflik kedua Negara didasari pada nilai nasional. Tiongkok adalah Negara yang menganut ajaran Konfusianisme, dimana didalamnya terkandung nilai tentang hidup damai dalam harmoni. *Zhoubian zhengce* atau *the Good Neighbor Policy* adalah konsep yang mengatur pola hubungan Tiongkok dengan Negara tetangga. Hal ini dilakukan untuk membentuk relasi kuat dengan Negara tetangga guna mencapai stabilitas regional, mengubah citranya sebagai kekuatan yang bertanggung jawab, yang ingin meningkatkan stabilitas, keamanan dan kerjasama regional. *Peaceful Rise* atau *heping jueqi* bersumber pada nilai untuk bersikap bertanggung jawab, perdamaian, dan sebagai kekuatan global yang tidak mengancam. (www.grin.com. 2012)

India menggunakan ajaran Hindu sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan, salah satunya yaitu tentang *ethic of war* yaitu *dharmayuddha* dan *kuttayudhha* yaitu tentang perang yang adil dan perang yang tidak adil (*just and un-just war*). Nilai perdamaian juga terdapat pada konsep Ahimsa yaitu tanpa kekerasan.

Faktor interdependensi ekonomi dalam penerapan kebijakan expeditious disengagement

Kalkulasi kebijakan perang apabila perang benar terjadi adalah faktor penting dalam pengambilan kebijakan *expeditious disengagement*. Perang adalah destruktif dan pilihan terburuk ketika konflik tidak bisa diredam. Tiongkok dan India sebagai *emerging power* tentu sangat mempertimbangkan aspek pertumbuhan ekonomi sebagai pendorong kemajuan Negara. Aspek stabilitas dan keamanan adalah hal mutlak yang ingin dicapai oleh Tiongkok dan India dalam mencapai pertumbuhan ekonomi. Hubungan saling membutuhkan antara Tiongkok dan India, seharusnya tidak akan dirusak oleh perang. Perang yang terjadi akan menimbulkan

kerugian yang besar, dilihat dari kemampuan militer kedua Negara yang relatif seimbang. Apabila perang terjadi maka akan terjadi perang nuklir diantara keduanya, ataupun meluas menjadi perang segitiga nuklir dikawasan.

Liberal berpendapat bahwa adanya ketergantungan ekonomi akan menurunkan kemungkinan perang dengan meningkatnya nilai perdagangan daripada memilih alternatif untuk agresi. Negara yang saling bergantung secara ekonomi akan lebih memilih untuk berdagang daripada menyerang. Selama tingkat saling ketergantungan yang tinggi dapat dipertahankan, kaum liberal menegaskan bahwa tetap ada optimisme konflik tidak akan terjadi. Dengan terjalinnya hubungan yang baik pada sektor perekonomian, maka diharapkan akan meningkatkan komunikasi dan mengurangi kesalahpahaman sehingga dapat mengurangi tensi konflik (Copeland, 1996).

Pada tahun 2017 ketika krisis Doklam terjadi, perdagangan diantara Tiongkok dan India yang melewati Nathu La menurun hingga 90%. Pada tahun 2016 tercatat nilai ekspor dan impor kedua negara mencapai angka 8.904,955 USD dan 2.693,819 USD. Angka tersebut menurun drastis pada tahun 2017, dimana nilai ekspor hanya mencapai 109,288 USD dan nilai impor turun menjadi 14,237 USD. Pengawas bea cukai di Serathang, Subrata Lakra menyatakan bahwa penurunan tersebut terjadi karena ditutupnya jalur perdagangan selama satu bulan karena krisis Doklam. Krisis yang terjadi selama 73 hari tersebut mampu menurunkan perdagangan di salah satu jalur perdagangan hingga mencapai 90%. (www.thehindu.com. 2018)

Apabila dilihat dari tabel dan grafik perdagangan dibawah, Tiongkok dan India berada dalam kondisi yang disebut interdependensi ekonomi, Dapat dilihat bahwa nilai impor India terhadap Tiongkok relatif lebih tinggi daripada ekspor, hal tersebut mengakibatkan *trade balance* India berada pada nilai negatif. Dengan adanya *trade balance* yang negatif oleh India dapat dinyatakan bahwa terjadi interdependensi ekonomi, India merupakan Negara yang memerlukan komoditas impor dari Tiongkok, sedangkan India merupakan pasar bagi produk ekspor Tiongkok

Gambar 1. Perdagangan Tiongkok-India



Sumber: Kementerian Perdagangan India, 2016

Apabila dilihat dari tabel dan grafik perdagangan diatas, Tiongkok dan India berada dalam kondisi yang disebut interdependensi ekonomi, Dapat dilihat bahwa nilai impor India terhadap Tiongkok relatif lebih tinggi daripada ekspor, hal tersebut mengakibatkan *trade balance* India berada pada nilai negatif. Dengan adanya *trade balance* yang negatif oleh India dapat dinyatakan bahwa terjadi interdependensi ekonomi, India merupakan Negara yang memerlukan komoditas impor dari Tiongkok, sedangkan India merupakan pasar bagi produk ekspor Tiongkok

Interdependensi ekonomi mempengaruhi pengambilan kebijakan untuk menurunkan tensi ketegangan antara Tiongkok dan India apabila dilihat dari logika liberal, bahwa Negara adalah aktor yang memaksimalkan keuntungan dengan sektor perekonomian dan perdagangan bebas sebagai motor penggerak. Ketegangan pada konflik Doklam hanya akan mempengaruhi perdagangan bilateral kedua Negara, hal tersebut dapat menjadi faktor yang mendorong kedua Negara untuk menjaga hubungan tetap dalam kondisi yang baik agar pertumbuhan ekonomi tetap stabil.

KESIMPULAN

Penurunan tensi ketegangan dengan diterapkannya kebijakan *expeditious disengagement* antara Tiongkok dengan India merupakan keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan rasional kedua Negara. Berdasarkan dua konsep yang menjadi acuan penulis dalam menganalisa aspek pendorong penerapan kebijakan *expeditious disengagement*, dapat diambil kesimpulan bahwa kepentingan nasional dan faktor interdependensi ekonomi memiliki pengaruh penting bagi kedua Negara. Hubungan Tiongkok dengan India selalu berada dalam kondisi yang fluktuatif, terdapat isu yang menyebabkan naiknya tensi hubungan kedua Negara khususnya dikarenakan permasalahan batas Negara yang hingga saat ini belum terselesaikan.

Konflik kedua Negara selalu berakhir dengan adanya negosiasi politik, dimana Kepentingan nasional menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebijakan yang tepat untuk menjaga hubungan dalam kondisi yang lebih stabil. Kepentingan nasional yang dijelaskan dalam bentuk kepentingan pertahanan atau keamanan nasional, pertumbuhan ekonomi, *world order* atau efek *Balance of Power*, dan kepentingan prestise nasional berfungsi sebagai penghalang untuk mencegah sikap agresif yang dilakukan keduanya. Kepentingan interdependensi ekonomi mempengaruhi pengambilan kebijakan karena terdapat hubungan saling membutuhkan yang mendorong untuk tetap menjaga perdamaian, mengingat keduanya adalah partner dagang yang strategis.

REFERENSI

- Bojang, AS. 2018. "the Study of Foreign Policy in International Relation". *Journal of Political Sciences & public Affairs* Vol.6: 337
- Champose, Philip. 2016. "India's National Security Strategy". https://www.claws.in/images/journals_doc/52385527_1117566064_PhilipCampose.pdf diakses pada 1/9/2019
- Copeland, D.C. (1996), "Economic interdependence and war: a theory of trade expectations", *International Security*, Vol. 20 No. 4, pp. 5-41, available at: <https://doi.org/10.1162/isec.20.4.5>, diakses pada 22/9/2019
- Dasgupta, Saibal. 2017. "Russia Refused to toe China line on Doklam: Envoy". <https://timesofindia.indiatimes.com/world/china/russia-refuses-to-be-influenced-by-china-on-doklam-issue/articleshow/60328019.cms>. Diakses pada 1/9/2019

- Donald E Nuechterlein. 1976. "National Interest and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision Making. *British Journal of International Studies*, Vol. 2 No. 3 pp 264-266
- Korbel, J. and Chen, C.-K. (2009), "China and Taiwan: a future of peace? A study of economic interdependence, Taiwanese domestic politics and cross-strait relations China and Taiwan: a future of peace? A study of economic interdependence, Taiwanese domestic politics and cross-strait relations", *Josef Korbel Journal of Advanced International Studies*, Vol. 1, pp. 14-25, available at: <https://digitalcommons.du.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1003&>, diakses pada 20/9/2019
- Luthi, Lorenz. 2012. "*Sino- Indian Relations, 1954-1962*". Slavic Research Center: Hokkaido University, Vol. 3 Special Issue, pp 93-119.
- Muller, Eva. 2012. "the Meaning of Harmony in China and it's Importance in Business Life". <https://www.grin.com/document/296059>. Diakses pada 1/9/2019
- Rosecrance, Richard. 1991. "The Rise of the Trading State", terjemahan Budiono Kusumohamidjojo, dengan judul kebangkitan negara dagang, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Shing, Shiv. 2018. "Doklam effect: trade at Nathu La dips 90%". <https://www.thehindu.com/news/national/doklam-effect-trade-at-nathu-la-dips-90/article24781298.ece>. Diakses pada 29/8/2019